



Manajemen BKM At-Tawwabin Jalan Pimpinan Kota Medan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Wahyu Andreansyah Siregar^{1*}, Soiman²

¹⁻²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: wahyu0104223215@uinsu.ac.id^{1*}, soiman@uinsu.ac.id²

*Penulis Korespondensi: wahyu0104223215@uinsu.ac.id

Abstract. *This study aims to know the management of the Mosque Prosperity Board (BKM) of At-Tawwabin Mosque, Jalan Pimpinan, Medan City, in community economic empowerment. The background of this research is based on the need to optimize the function of mosques not only as places of ritual worship but also as centers of social and economic empowerment. In practice, the management of mosque assets such as parking areas and the organization of Ramadan stalls has become a strategic effort implemented by BKM to improve the welfare of the surrounding community. However, the implementation of these policies also creates social dynamics that require professional and equitable management. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through field observations, in-depth interviews with the chairman and administrators of BKM, parking attendants, and Ramadan stall traders, as well as documentation of mosque activities. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, supported by triangulation techniques to ensure data validity. The findings indicate that the management of BKM At-Tawwabin has implemented planning, organizing, actuating, and controlling functions in managing mosque-based economic programs. Parking management provides employment opportunities for local residents, while Ramadan stalls significantly increase the income of small traders during the holy month. Overall, participatory and structured management enables the mosque to function not only as a center of worship but also as a center of economic empowerment that contributes meaningfully to community welfare.*

Keywords: *Economic Empowerment; Mosque Prosperity Board; Mosque; Ramadan Stalls; Social Activities.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen Badan Kemakmuran Masjid (BKM) At-Tawwabin Jalan Pimpinan Kota Medan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya optimalisasi fungsi masjid yang tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi umat. Dalam praktiknya, pengelolaan aset masjid seperti lahan parkir dan pelaksanaan lapak Ramadan menjadi strategi yang diterapkan BKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Namun, implementasi kebijakan tersebut juga menghadirkan dinamika sosial yang perlu dikelola secara profesional dan adil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan Ketua dan pengurus BKM, petugas parkir, serta pedagang lapak Ramadan, dan dokumentasi kegiatan masjid. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen BKM At-Tawwabin telah menerapkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan program ekonomi berbasis masjid. Pengelolaan parkir memberikan peluang kerja bagi masyarakat lokal, sedangkan lapak Ramadan mampu meningkatkan pendapatan pedagang kecil secara signifikan selama bulan suci. Secara keseluruhan, manajemen yang partisipatif dan terstruktur menjadikan masjid sebagai pusat ibadah sekaligus pusat pemberdayaan ekonomi yang berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.

Kata kunci: Lapak Ramadan; Manajemen BKM; Masjid; Parkir Masjid; Pemberdayaan Ekonomi.

1. PENDAHULUAN

Masjid tidak semata-mata berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah ritual, melainkan juga memiliki peran strategis dalam membangun tatanan sosial serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat melalui tata kelola yang baik. Sejak masa Rasulullah saw., masjid telah difungsikan sebagai pusat berbagai aktivitas umat, mulai dari kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, hingga aktivitas ekonomi yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Peran yang bersifat multidimensional tersebut menegaskan bahwa masjid merupakan institusi sosial-keagamaan yang memiliki potensi besar dalam mendorong kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara profesional. Dalam konteks kehidupan masyarakat modern, keberadaan masjid semakin relevan sebagai ruang publik keagamaan yang diharapkan mampu merespons berbagai persoalan sosial, seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber penghidupan yang layak (Aslati et al. 2018).

Optimalisasi peran sosial dan ekonomi masjid menuntut adanya manajemen yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Pengelolaan masjid tidak cukup hanya difokuskan pada penyelenggaraan kegiatan ibadah, tetapi juga perlu diarahkan pada strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Pemberdayaan ekonomi berbasis masjid menjadi salah satu pendekatan strategis karena masjid memiliki kedekatan sosial dan emosional yang kuat dengan masyarakat sekitarnya. Melalui pengelolaan aset, pelaksanaan program ekonomi produktif, serta penerapan kebijakan sosial yang tepat, manajemen masjid berpotensi menjadi penggerak utama dalam peningkatan ekonomi umat, khususnya bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah (Jamaluddin Arsyad et al. 2021).

Masjid At-Tawwabin yang berlokasi di Jalan Pimpinan, Kota Medan, merupakan salah satu masjid yang berupaya mengimplementasikan fungsi sosial-ekonomi tersebut melalui manajemen BKM yang aktif. Masjid ini tidak hanya berperan sebagai pusat kegiatan ibadah, tetapi juga memiliki keterlibatan signifikan dalam dinamika sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Melalui pengelolaan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) yang dipimpin oleh Ustadz Masdar Tambusay, S.Ag., berbagai kebijakan dirancang untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat secara langsung. Upaya tersebut merupakan bagian dari dakwah bil hal, yaitu dakwah yang diwujudkan melalui tindakan nyata dalam menjawab kebutuhan sosial dan ekonomi umat. Salah satu bentuk implementasi pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh manajemen BKM At-Tawwabin adalah pemanfaatan halaman masjid sebagai area parkir. Kebijakan ini dimaksudkan untuk membuka peluang kerja serta sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar yang terlibat sebagai petugas parkir maupun pengelola teknis lainnya. Dari perspektif manajemen BKM, pemanfaatan halaman masjid sebagai lahan parkir dipandang sebagai langkah strategis untuk membantu

memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat tanpa mengesampingkan fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah.

Namun demikian, kebijakan pemanfaatan halaman Masjid At-Tawwabin sebagai lahan parkir yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat menimbulkan dinamika sosial di lapangan. Pada praktiknya, lahan parkir tersebut banyak dimanfaatkan oleh siswa MAN 2 Medan sehingga volume kendaraan meningkat secara signifikan pada jam-jam tertentu. Kondisi ini memunculkan keluhan dari sebagian jamaah, terutama pada waktu pelaksanaan salat Dhuha dan salat Zuhur. Kepadatan kendaraan dinilai menyulitkan akses jamaah menuju tempat ibadah serta mengurangi kenyamanan dan kekhusyukan beribadah. Situasi tersebut menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara orientasi manajemen BKM yang menitikberatkan pada aspek pemberdayaan ekonomi dan harapan sebagian jamaah yang lebih mengutamakan fungsi utama masjid sebagai ruang ibadah yang tertib dan kondusif.

Selain persoalan pemanfaatan lahan parkir, dinamika pemberdayaan ekonomi juga terlihat pada aktivitas lapak Ramadan yang berlangsung setiap bulan puasa. Kegiatan ini telah menjadi bagian dari kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar masjid dan difasilitasi oleh BKM sebagai bentuk dukungan terhadap usaha kecil. Melalui kebijakan manajemen, para pedagang diberikan kesempatan berjualan tanpa dikenakan biaya sewa lapak sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat lokal. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan warga serta mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan berbasis masjid, khususnya pada momentum Ramadan yang memiliki nilai religius dan ekonomi yang tinggi.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut menghadapi tantangan ketika pedagang dari luar wilayah Jalan Pimpinan turut berjualan di sekitar masjid. Keberadaan pedagang luar ini memunculkan persoalan karena adanya praktik pembayaran lapak kepada pihak tertentu di luar struktur BKM. Akibatnya, masyarakat sekitar mengalami keterbatasan dalam memperoleh ruang berjualan yang seharusnya menjadi prioritas mereka. Kondisi ini menyebabkan tujuan awal pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal tidak sepenuhnya tercapai dan berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial. Masyarakat yang menjadi sasaran utama program justru menghadapi persaingan yang tidak seimbang dalam memperoleh manfaat ekonomi selama bulan Ramadan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa manajemen BKM dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat memiliki kompleksitas tersendiri. Di satu sisi, BKM memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan ekonomi berbasis masjid. Di sisi lain, implementasi kebijakan di lapangan tidak terlepas dari berbagai kepentingan dan dinamika sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan manajemen yang lebih terstruktur, regulasi yang jelas, serta prinsip keadilan agar tujuan pemberdayaan ekonomi dapat berjalan optimal tanpa

menimbulkan konflik sosial.

Dalam penelitian “Manajemen BKM At-Tawwabin Jalan Pimpinan Kota Medan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, teori yang digunakan adalah teori manajemen klasik menurut George R. Terry yang dikenal dengan fungsi POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*). Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan dalam merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengawasi setiap program. Dalam konteks penelitian ini, teori POAC digunakan untuk menganalisis bagaimana BKM At-Tawwabin mengelola program pemberdayaan ekonomi seperti parkir masjid dan lapak Ramadan. Penerapan fungsi manajemen terlihat dari perencanaan program ekonomi sesuai kebutuhan masyarakat, pengorganisasian tugas pengurus dan masyarakat, pelaksanaan kegiatan secara langsung, serta pengawasan untuk menjaga ketertiban dan keberhasilan program. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen yang terstruktur berperan penting dalam keberhasilan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep manajemen masjid berbasis pemberdayaan, yang menekankan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi. Melalui keterlibatan masyarakat dan pemanfaatan aset masjid, BKM dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar (Terry, 2014). Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji peran masjid dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf produktif, dan program ekonomi kreatif berbasis komunitas.

Namun, kajian yang secara khusus menelaah manajemen BKM dalam pengelolaan ruang dan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar masjid, terutama terkait pemanfaatan lahan dan aktivitas ekonomi musiman seperti Ramadan, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan dengan menyoroti praktik manajemen BKM At-Tawwabin dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dari perspektif tata kelola dan dinamika sosial lokal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen BKM Masjid At-Tawwabin Jalan Pimpinan Kota Medan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi (2020) dengan judul *Manajemen Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Masjid Al-Ikhlas Kota Medan* menjelaskan bahwa pengelolaan masjid yang baik meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi jamaah. Program yang dijalankan

berupa koperasi masjid, pelatihan kewirausahaan, serta pemanfaatan dana zakat dan infak sebagai modal usaha. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus pembahasan mengenai manajemen masjid dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada Masjid Al-Ikhlas secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik pada manajemen BKM At- Tawwabin di Jalan Pimpinan Kota Medan.

Penelitian oleh Siti Rahmawati (2019) yang berjudul Peran Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Jamaah mengkaji bagaimana BKM sebagai lembaga pengelola masjid memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui program bantuan modal usaha, pengelolaan zakat produktif, serta kegiatan usaha mikro berbasis masjid. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang profesional dan transparan dalam menjalankan fungsi organisasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas peran BKM dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup penelitian yang masih bersifat umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada satu objek tertentu yaitu BKM At-Tawwabin.

Selanjutnya, penelitian Muhammad Arifin (2021) dengan judul Strategi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid melalui Pengelolaan Zakat dan Infak menjelaskan bahwa strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah secara produktif, seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang tepat mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara signifikan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang lebih menitikberatkan pada strategi pengelolaan dana, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji manajemen BKM secara menyeluruh, baik dari aspek organisasi, program, maupun implementasinya di BKM At-Tawwabin Jalan Pimpinan Kota Medan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam manajemen BKM Masjid At-Tawwabin dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat serta menganalisis dinamika sosial yang muncul dari kebijakan ekonomi yang dijalankan. Pendekatan

deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan BKM dalam mengelola program-program ekonomi berbasis masjid berdasarkan perspektif para informan yang terlibat. Penelitian ini dilaksanakan di Masjid At-Tawwabin yang berlokasi di Jalan Pimpinan, Kota Medan. Lokasi penelitian dipilih karena BKM Masjid At-Tawwabin memiliki peran aktif dalam pengelolaan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Fokus penelitian meliputi manajemen pengelolaan lahan parkir masjid serta pengaturan aktivitas ekonomi masyarakat pada bulan Ramadan. Kedua aspek tersebut dinilai relevan karena berkaitan langsung dengan strategi manajemen BKM dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat serta menimbulkan berbagai respons sosial di lingkungan sekitar masjid.

Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid At-Tawwabin, khususnya Ketua BKM Ustadz Masdar Tambusay, S.Ag., serta pengurus lainnya yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program ekonomi. Selain itu, data primer juga diperoleh dari masyarakat sekitar, petugas parkir, serta para pedagang lapak Ramadan yang secara langsung merasakan dampak kebijakan pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh BKM. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi berupa arsip administrasi masjid, laporan kegiatan, serta sumber pustaka dan penelitian terdahulu yang relevan dengan manajemen masjid dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan manajemen BKM dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas pengelolaan parkir dan pelaksanaan lapak Ramadan sebagai bagian dari strategi ekonomi berbasis masjid. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa foto kegiatan, dokumen administrasi, serta catatan program ekonomi yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, dikategorikan, dan difokuskan sesuai dengan tema manajemen BKM dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar pola, hubungan, dan strategi manajerial yang diterapkan dapat dipahami secara sistematis. Tahap akhir dilakukan

dengan menarik kesimpulan berdasarkan temuan lapangan yang mencerminkan efektivitas dan tantangan manajemen BKM dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat

Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara pengurus BKM dengan keterangan masyarakat, serta mencocokkannya dengan hasil observasi dan dokumentasi. Melalui teknik ini, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi serta mampu menggambarkan praktik manajemen BKM At-Tawwabin dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat secara objektif dan komprehensif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen BKM At-Tawwabin Jalan Pimpinan Kota Medan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Masjid dalam perspektif keilmuan Islam dan sosial tidak hanya dipahami sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki potensi strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui sistem manajemen yang terarah. Berbagai kajian dalam jurnal open access menunjukkan bahwa masjid yang dikelola secara profesional mampu berfungsi sebagai pusat pengembangan sosial dan ekonomi berbasis komunitas. Penelitian dalam Jurnal Ilmu Dakwah dan Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat menegaskan bahwa optimalisasi manajemen masjid berkontribusi pada peningkatan partisipasi jamaah serta penguatan kemandirian ekonomi masyarakat sekitar (Rifa, 1999)

Manajemen Badan Kemakmuran Masjid (BKM) menjadi faktor utama dalam menggerakkan fungsi pemberdayaan ekonomi tersebut. Studi-studi open access dalam Jurnal Manajemen Dakwah menjelaskan bahwa BKM yang menerapkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan secara berkelanjutan mampu menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas ekonomi umat yang inklusif. Program seperti pengelolaan parkir, fasilitasi lapak Ramadan, dan kegiatan sosial produktif menjadi indikator bahwa manajemen masjid tidak hanya berorientasi pada aspek ibadah, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Semin et al., 2025). Dalam Al-Quran dijelaskan dalam Surah At-Taubah Ayat 8 :

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَى اللَّهِ ۚ فَكَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya : “Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah. Maka mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Ayat ini menegaskan bahwa manajemen masjid tidak hanya sebatas pengelolaan fisik bangunan, tetapi lebih kepada upaya memakmurkan masjid melalui aktivitas ibadah, sosial, dan pendidikan yang berlandaskan keimanan. Orang yang diberi amanah mengelola masjid harus memiliki integritas spiritual, seperti menjaga salat, amanah dalam pengelolaan dana (zakat/inafaq), serta berani mengambil keputusan yang benar tanpa tekanan pihak lain. Dengan demikian, manajemen masjid mencakup aspek kepemimpinan yang berakhlak, transparansi, serta program-program yang menghidupkan fungsi masjid sebagai pusat pembinaan umat.

Selain itu, literatur ilmiah menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam program ekonomi berbasis masjid sebagai bagian dari strategi manajerial. Ketika masyarakat dilibatkan sebagai pelaku utama dalam aktivitas ekonomi, maka rasa memiliki terhadap program yang dijalankan akan meningkat. Hal ini berdampak pada keberlanjutan program pemberdayaan serta memperkuat posisi masjid sebagai pusat pengembangan ekonomi komunitas di tingkat lokal (Centers, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ust. Masdar Tambusai, S.Ag selaku Ketua BKM Masjid At-Tawwabin, ditegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi salah satu fokus utama dalam manajemen masjid. Ia menyampaikan bahwa BKM berupaya mengelola aset masjid secara produktif melalui kebijakan yang memberikan peluang kerja dan usaha bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, manajemen masjid harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi nyata tanpa mengabaikan fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah.

Senada dengan itu, Muhammad Rudi, S.T selaku Sekretaris BKM menjelaskan bahwa kebijakan pengelolaan parkir dan lapak Ramadan dirancang sebagai bagian dari strategi manajemen ekonomi masjid. Ia menegaskan bahwa melalui pengelolaan yang terstruktur dan terkoordinasi, masyarakat memperoleh peluang penghasilan tambahan secara tertib dan terorganisir. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa manajemen BKM berupaya menjaga keseimbangan antara fungsi spiritual dan fungsi ekonomi.

Masjid memiliki fungsi strategis tidak hanya sebagai ruang spiritual, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat apabila dikelola dengan sistem manajemen yang efektif. Pengelolaan aset masjid secara produktif dapat menjadi sarana peningkatan pendapatan masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Program seperti pengaturan parkir dan penyediaan lapak usaha merupakan bentuk konkret implementasi manajemen ekonomi berbasis masjid yang memberikan manfaat langsung kepada warga sekitar (Pgri, 2014)

Manajemen BKM sangat menentukan dalam keberhasilan strategi pemberdayaan tersebut. BKM bertindak sebagai perencana kebijakan, pelaksana program, sekaligus pengawas dalam memastikan kegiatan ekonomi berjalan sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan. Ketika sistem

manajemen mampu melibatkan masyarakat secara aktif, maka program pemberdayaan ekonomi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangan akademik bahwa tata kelola yang baik menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan ekonomi berbasis lembaga keagamaan (Kudus et al., 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ust. Masdar Tambusai, S.Ag selaku Ketua BKM, diketahui bahwa pengelolaan ekonomi masjid dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sekitar. Ia menegaskan bahwa kebijakan ekonomi harus dirancang agar tidak menimbulkan konflik sosial serta tetap menjaga keharmonisan jamaah. Menurutnya, manajemen BKM berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi selaras dengan visi masjid sebagai pusat kemaslahatan umat.

Sementara itu, Muhammad Rudi, S.T selaku Sekretaris BKM menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam program ekonomi dilakukan melalui pendekatan partisipatif. Ia menyampaikan bahwa masyarakat diberikan ruang untuk berperan sebagai pelaku usaha maupun pengelola teknis dalam kegiatan ekonomi masjid. Dengan demikian, manajemen BKM tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat pemberdayaan.

Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai institusi yang mampu mendorong transformasi ekonomi masyarakat melalui manajemen yang efektif. Penelitian menunjukkan bahwa masjid yang mengembangkan program ekonomi produktif dapat meningkatkan kesejahteraan jamaah serta memperkuat solidaritas sosial. Pemberdayaan ekonomi melalui pengelolaan aset masjid menjadi strategi yang relevan dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern (Rifa, 1999). Selain itu, pendekatan manajemen yang inklusif dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi yang dijalankan. Pengelolaan yang melibatkan jamaah dan masyarakat sekitar mampu menciptakan sistem ekonomi komunitas yang berkelanjutan. Hal ini memperlihatkan bahwa manajemen BKM memiliki posisi strategis dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis masjid (Semin et al., 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ust. Masdar Tambusai, S.Ag, selaku Ketua BKM Masjid At-Tawwabin, ditegaskan bahwa setiap kebijakan ekonomi dirumuskan melalui musyawarah pengurus. Ia menjelaskan bahwa program pemberdayaan seperti parkir dan lapak Ramadan bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh tambahan pendapatan. Menurutnya, manajemen masjid harus adaptif terhadap dinamika ekonomi masyarakat sekitar. Sementara itu, Muhammad Rudi, S.T selaku Sekretaris BKM menambahkan bahwa evaluasi program ekonomi dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas dan kebermanfaatannya. Ia menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan manajemen BKM. Dengan demikian, masjid berkembang tidak hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai

pusat penguatan ekonomi dan solidaritas sosial masyarakat.

Manajemen BKM At-Tawwabin Jalan Pimpinan Kota Medan menunjukkan bahwa tata kelola masjid yang sistematis dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengelolaan aset seperti parkir dan lapak Ramadan membuktikan adanya strategi terarah dalam menciptakan peluang usaha bagi warga sekitar. Hasil wawancara dengan Ketua dan Sekretaris BKM memperlihatkan bahwa manajemen yang partisipatif dan berorientasi pada kemaslahatan mampu menghadirkan manfaat ekonomi nyata tanpa mengesampingkan fungsi utama masjid sebagai pusat ibadah.

Dalam kajian manajemen masjid, terdapat tiga fungsi utama yaitu idarah, imarah, dan riayah. Berdasarkan isi penelitian bahwa penelitian ini lebih dominan termasuk dalam kategori imarah, meskipun ada sedikit unsur idarah.

Penelitian “Manajemen BKM At-Tawwabin Jalan Pimpinan Kota Medan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat” secara tegas termasuk dalam kategori imarah dalam konsep manajemen masjid. Hal ini karena fokus utama penelitian bukan sekadar pada aspek pengelolaan organisasi (idarah) maupun pemeliharaan sarana dan prasarana masjid (riayah), melainkan pada upaya memakmurkan masjid melalui aktivitas yang berdampak langsung kepada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Imarah menekankan bagaimana masjid dihidupkan dengan berbagai kegiatan yang melibatkan jamaah dan memberikan manfaat nyata, baik dalam bidang keagamaan, sosial, maupun ekonomi. Dalam penelitian ini, bentuk imarah terlihat sangat jelas melalui program pemberdayaan ekonomi seperti pengelolaan parkir dan lapak Ramadan yang melibatkan masyarakat sekitar sebagai pelaku utama. BKM tidak hanya mengatur, tetapi juga mengaktifkan fungsi masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi umat, sehingga masjid menjadi ruang produktif yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Keterlibatan langsung masyarakat, pemberian kesempatan usaha, serta dampak ekonomi yang dirasakan menunjukkan bahwa masjid telah berfungsi secara hidup dan dinamis, yang merupakan inti dari konsep imarah.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penelitian ini berorientasi pada penguatan fungsi imarah masjid, karena menempatkan masjid sebagai pusat pemberdayaan umat yang nyata, bukan hanya simbolik. Seluruh temuan penelitian mengarah pada bagaimana masjid dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi yang terstruktur dan partisipatif. Oleh karena itu, penelitian ini bukan hanya mengandung unsur imarah, tetapi secara substansi didominasi dan berfokus utama pada implementasi imarah dalam manajemen masjid.

Pengelolaan Parkir Masjid sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal

Pengelolaan masjid dalam konteks sosial-ekonomi umat tidak terbatas pada pelaksanaan ibadah ritual, tetapi juga mencakup pemanfaatan aset masjid untuk kepentingan kesejahteraan

masyarakat sekitar. Pemanfaatan lahan parkir masjid merupakan salah satu bentuk pengelolaan aset yang mampu memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat, terutama ketika dikelola secara terencana dan berorientasi pada kemaslahatan umat tanpa mengesampingkan fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah (Islam et al., 2025). Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, pengelolaan parkir masjid yang melibatkan warga lokal sebagai pelaksana operasional dinilai efektif dalam menciptakan peluang kerja berbasis komunitas. Model pengelolaan seperti ini memperlihatkan bahwa masjid dapat berperan sebagai pusat ekonomi mikro yang inklusif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga terlibat aktif dalam proses manajemennya. Keterlibatan ini berdampak pada peningkatan pendapatan warga kecil serta mempererat hubungan sosial antara masjid dan lingkungan sekitarnya (Mulyandi et al., 2024).

Selain itu, peran Badan Kemakmuran Masjid (BKM) sangat menentukan dalam menjamin bahwa pengelolaan parkir berjalan secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Tata kelola yang baik mencakup pengaturan petugas parkir, pencatatan pemasukan, serta mekanisme pembagian hasil yang jelas, sehingga kepercayaan jamaah dan masyarakat terhadap kebijakan BKM semakin kuat. Dengan demikian, pengelolaan parkir tidak hanya menjadi sumber pendanaan operasional masjid, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan penguatan fungsi sosial masjid (Cokrohadisumarto & Sari, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ust. Masdar Tambusai, S.Ag selaku Ketua BKM Masjid At-Tawwabin, pengelolaan parkir di masjid dilaksanakan sebagai upaya membantu masyarakat sekitar sekaligus menjaga ketertiban lingkungan masjid. Ia menegaskan bahwa kebijakan parkir tidak dimaksudkan untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai bentuk pelayanan dan pemberdayaan, di mana warga sekitar diberi kesempatan untuk terlibat sebagai petugas parkir dan memperoleh penghasilan tambahan.

Sementara itu, hasil wawancara dengan petugas parkir menunjukkan bahwa keberadaan parkir masjid memberikan dampak ekonomi yang cukup berarti bagi kehidupan mereka. Meskipun pendapatan yang diperoleh tidak besar, namun mampu membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Informan juga menyampaikan bahwa keterlibatan mereka dalam pengelolaan parkir menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan jamaah, sehingga hubungan antara masjid dan masyarakat menjadi lebih erat

Pengelolaan masjid sebagai institusi sosial-ekonomi mendapatkan perhatian besar karena potensinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkungan masjid. Pemanfaatan lahan parkir sebagai aset produktif memperlihatkan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai ruang ibadah, tetapi juga sebagai ruang pemberdayaan masyarakat. Melalui

partisipasi warga dalam pengelolaan parkir, masjid secara langsung berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi warga lokal (Islam et al., 2025).

Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang difasilitasi masjid menegaskan bahwa pendekatan yang inklusif dan partisipatif dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mempererat hubungan sosial antara jamaah dan warga sekitar. Pendekatan ini menempatkan masjid sebagai aktor sosial-ekonomi yang mampu menjembatani kebutuhan spiritual dan materi dalam satu kesatuan fungsi yang saling mendukung (Mulyandi et al., 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ust. Masdar Tambusai, S.Ag, pengelolaan parkir Masjid At-Tawwabin dilakukan bukan semata untuk mengatur kendaraan, tetapi sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Ia menyatakan bahwa BKM secara sengaja memprioritaskan warga setempat untuk menjadi petugas parkir agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh komunitas lokal. Menurutnya, pendekatan ini juga menjadi cara untuk meningkatkan keterlibatan jamaah dalam semua aktivitas masjid.

Sementara itu, informasi dari petugas parkir yang ditugaskan di area masjid menunjukkan bahwa keberadaan pengelolaan parkir berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Walaupun pendapatan yang diperoleh bukan jumlah besar, tetapi cukup signifikan untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka juga menyampaikan bahwa terlibat dalam kegiatan parkir di masjid membuat mereka merasa lebih dekat dengan kegiatan keagamaan dan memiliki tanggung jawab dalam menjaga kenyamanan serta keamanan jamaah yang datang beribadah.

Pengelolaan parkir masjid sebagai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal menunjukkan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga sebagai institusi sosial-ekonomi yang mampu memanfaatkan asetnya untuk kemaslahatan umat. Optimalisasi lahan parkir secara produktif, transparan, dan berkelanjutan dapat menciptakan peluang kerja berbasis komunitas, meningkatkan pendapatan masyarakat kecil, serta memperkuat hubungan sosial antara masjid dan lingkungan sekitarnya (Kasus & Kota, 2025).

Hal ini tercermin pada praktik pengelolaan parkir di Masjid At-Tawwabin, di mana BKM melibatkan warga sekitar sebagai petugas parkir, menata sistem operasional secara terbuka, dan menyalurkan hasilnya untuk kepentingan bersama. Hasil wawancara dengan Ketua BKM, Ust. Masdar Tambusai, S.Ag, serta petugas parkir menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya membantu ketertiban dan pelayanan jamaah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan keterikatan sosial masyarakat terhadap masjid.

Secara manajerial, pengelolaan parkir masjid juga menunjukkan adanya penerapan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang berjalan secara sistematis. Perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan jamaah serta potensi ekonomi yang

dapat dihasilkan, sementara pengorganisasian terlihat dari pembagian tugas yang jelas kepada petugas parkir. Pelaksanaan dan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan agar kegiatan parkir tetap tertib, tidak mengganggu aktivitas ibadah, serta tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Selain aspek ekonomi, pengelolaan parkir masjid juga memiliki dimensi sosial yang signifikan. Keterlibatan warga sekitar sebagai petugas parkir membangun rasa memiliki terhadap masjid dan memperkuat solidaritas sosial di lingkungan tersebut. Interaksi yang terjalin antara petugas parkir, jamaah, dan pengurus masjid menciptakan hubungan sosial yang lebih harmonis, sehingga masjid benar-benar berfungsi sebagai pusat kehidupan masyarakat, bukan hanya sebagai tempat pelaksanaan ibadah ritual. Di sisi lain, pengelolaan parkir yang berbasis pemberdayaan juga menjadi bentuk implementasi prinsip keadilan sosial dalam tata kelola masjid. Kesempatan kerja yang diberikan kepada masyarakat sekitar menunjukkan adanya upaya distribusi manfaat ekonomi secara lebih merata. Dengan demikian, pengelolaan parkir tidak sekadar menjadi aktivitas teknis pengaturan kendaraan, melainkan bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi yang memberikan dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga lokal.

Secara praktik, BKM mengawasi pengelolaan parkir dengan pendataan warga sekitar yang bersedia menjadi petugas. Mereka dipanggil, diajak berdiskusi, lalu ditetapkan jadwal tugas secara bergiliran agar pembagian kerja merata. BKM menentukan titik-titik parkir, jalur keluar-masuk kendaraan, serta batas area yang tidak boleh digunakan agar tidak mengganggu akses jamaah. Karcis atau sistem tanda parkir diatur langsung oleh pengurus, dan hasil parkir dikumpulkan setiap hari kepada bendahara untuk dicatat. Dalam hal ini, BKM tidak menyerahkan pengelolaan kepada pihak luar, tetapi mengontrol langsung alur operasional dan keuangan.

Dalam pelaksanaan hariannya, pengurus BKM rutin turun ke lokasi, terutama pada jam padat seperti Zuhur dan sore hari. Jika terjadi penumpukan kendaraan, pengurus langsung mengarahkan penataan ulang posisi parkir atau membatasi kendaraan yang masuk. Ketika muncul keluhan jamaah, BKM segera melakukan evaluasi cepat, misalnya dengan mengosongkan sebagian area menjelang waktu salat. Praktik ini menunjukkan bahwa manajemen dilakukan secara responsif dan situasional, bukan hanya berdasarkan aturan tertulis, tetapi melalui kontrol langsung di lapangan.

Pengelolaan parkir Masjid At-Tawwabin membuktikan bahwa optimalisasi aset masjid dapat menjadi strategi efektif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal apabila dikelola secara terencana, partisipatif, dan transparan. Melalui keterlibatan warga sekitar, sistem manajemen yang tertib, serta orientasi pada kemaslahatan umat, parkir masjid mampu memberikan manfaat ekonomi nyata sekaligus memperkuat fungsi sosial dan spiritual masjid dalam kehidupan

masyarakat. Manajemen BKM At-Tawwabin dalam Pengelolaan Lapak Ramadan sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pengelolaan lapak Ramadan di lingkungan Masjid At-Tawwabin merupakan bagian dari kebijakan manajerial BKM dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Kegiatan ini tidak hanya dipahami sebagai bazar musiman, tetapi sebagai program yang dirancang untuk membuka peluang usaha bagi pedagang kecil selama bulan suci. Dalam praktiknya, manajemen BKM menyusun sistem pengaturan lapak secara tertib agar aktivitas ekonomi berjalan selaras dengan kegiatan ibadah dan tetap menjaga ketertiban lingkungan masjid (Kalimah & Tamrin, n.d.)

Peningkatan aktivitas ekonomi selama Ramadan menjadi momentum yang dimanfaatkan BKM untuk memperkuat ekonomi lokal berbasis komunitas masjid. Permintaan makanan dan minuman berbuka puasa yang meningkat menciptakan peluang usaha yang signifikan bagi pedagang kecil. Melalui pengelolaan yang terstruktur, BKM memastikan bahwa kegiatan lapak Ramadan tidak hanya meningkatkan perputaran ekonomi, tetapi juga memperkuat fungsi sosial masjid sebagai pusat kegiatan umat (Haris & Mustomi, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Rahmawati, salah satu pedagang di lapak Ramadan Masjid At-Tawwabin, keberadaan lapak yang difasilitasi oleh BKM sangat membantu peningkatan penghasilan selama bulan puasa. Ia menjelaskan bahwa permintaan takjil, minuman dingin, dan makanan berbuka meningkat tajam menjelang waktu berbuka, sehingga penjualan jauh lebih tinggi dibandingkan hari biasa. Menurutnya, kebijakan BKM dalam menyediakan ruang usaha di area masjid memberi peluang tambahan yang signifikan bagi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Senada dengan itu, Bapak Ahmad yang juga berdagang di area lapak Ramadan menyampaikan bahwa kehadiran jamaah yang ramai selama Ramadan membuat usahanya lebih stabil. Ia menilai bahwa sistem pengelolaan yang dilakukan BKM menjadikan kegiatan jual beli lebih tertata dan aman. Menurutnya, keberadaan lapak di lingkungan masjid memperluas jaringan pelanggan sekaligus memberikan rasa nyaman dalam menjalankan usaha. Manajemen BKM dalam pelaksanaan lapak Ramadan menunjukkan adanya perencanaan dan pengorganisasian yang jelas. Penentuan lokasi, pengaturan jumlah pedagang, serta koordinasi teknis dilakukan agar kegiatan ekonomi tidak mengganggu aktivitas ibadah. Dengan pendekatan tersebut, lapak Ramadan tidak hanya menjadi ruang transaksi ekonomi, tetapi juga bagian dari sistem pemberdayaan yang terintegrasi dalam tata kelola masjid (Kalimah & Tamrin, n.d.).

Lapak Ramadan juga memperlihatkan bagaimana BKM mengoptimalkan momentum keagamaan sebagai strategi penguatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini memberikan ruang bagi

pedagang mikro untuk meningkatkan omzet melalui peningkatan konsumsi masyarakat selama bulan suci. Selain berdampak pada pendapatan, kegiatan tersebut turut membangun hubungan sosial yang lebih erat antara pedagang dan jamaah (Role et al., 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Nurhayati, salah satu pedagang lapak Ramadan, ia menyampaikan bahwa pendapatannya meningkat secara signifikan dibandingkan bulan biasa. Ia menuturkan bahwa lonjakan permintaan pada waktu berbuka puasa membantu menambah pemasukan keluarga menjelang Idulfitri. Ia juga merasa bahwa keberadaan lapak yang dikelola secara tertib oleh BKM membuat aktivitas berdagang lebih terarah dan nyaman. Sementara itu, Bapak Rahmat sebagai pedagang lain menyampaikan bahwa lapak Ramadan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga mempererat hubungan sosial antarwarga. Ia menjelaskan bahwa banyak jamaah yang menjadi pelanggan tetap dan menjalin komunikasi yang berkelanjutan. Menurutnya, suasana masjid menjadi lebih hidup karena adanya interaksi ekonomi yang tetap berada dalam nilai kebersamaan dan religiusitas. Secara manajerial, kebijakan lapak Ramadan menunjukkan bahwa BKM menerapkan

prinsip pemberdayaan berbasis partisipasi masyarakat. Warga sekitar diberi prioritas untuk membuka lapak sehingga distribusi manfaat ekonomi lebih merata. Kebijakan ini mencerminkan komitmen BKM dalam menjadikan masjid sebagai pusat keseimbangan antara fungsi spiritual dan fungsi sosial-ekonomi. (Syuhada et al., 2024).

Kegiatan lapak Ramadan juga menjadi bentuk implementasi strategi pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada potensi lokal. BKM tidak hanya menyediakan ruang, tetapi juga melakukan pengawasan agar kegiatan berjalan tertib dan sesuai dengan norma keagamaan. Dengan demikian, kegiatan ekonomi yang berlangsung tetap berada dalam koridor etika dan tata kelola yang baik (Tinggi & Ekonomi, 2025).

Berdasarkan wawancara lanjutan dengan para pedagang, mereka merasakan bahwa manajemen yang diterapkan BKM memberikan rasa aman dan kepastian selama berdagang. Penataan lokasi dan pengaturan waktu operasional membantu mereka menjalankan usaha secara lebih efektif. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak terlepas dari sistem manajemen yang jelas dan konsisten.

Selain memberikan dampak ekonomi langsung, lapak Ramadan juga memperkuat citra masjid sebagai institusi yang peduli terhadap kesejahteraan umat. Aktivitas ekonomi yang difasilitasi BKM menjadikan masjid lebih hadir dalam kehidupan sosial masyarakat. Keberadaan lapak memperlihatkan bahwa masjid mampu menjadi pusat interaksi sosial sekaligus ruang penguatan ekonomi komunitas.

Manajemen BKM At-Tawwabin dalam pengelolaan lapak Ramadan membuktikan bahwa

pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan melalui program sederhana namun terstruktur. Optimalisasi momentum Ramadan sebagai ruang aktivitas ekonomi menunjukkan adanya strategi yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan masjid yang profesional mampu menghadirkan manfaat ekonomi tanpa mengurangi nilai spiritualnya.

Dalam praktik pengelolaan lapak Ramadan, BKM membuka pendaftaran langsung kepada warga sekitar sebelum bulan puasa dimulai. Pengurus mendata nama pedagang, jenis dagangan, serta kebutuhan tempat. Setelah itu, BKM menentukan posisi lapak dengan mempertimbangkan keteraturan, akses jamaah, dan pemerataan lokasi agar tidak ada pedagang yang merasa dirugikan. Tidak ada biaya sewa yang dibebankan kepada warga lokal, namun BKM menetapkan aturan kebersihan, waktu operasional, serta larangan mengganggu jalur ibadah.

Saat Ramadan berlangsung, pengurus hadir langsung memantau aktivitas jual beli, terutama menjelang berbuka. Jika ada pedagang luar yang masuk tanpa koordinasi, BKM melakukan klarifikasi dan penertiban secara persuasif. Bila terjadi perselisihan antar pedagang terkait lokasi, pengurus menjadi mediator dan mengambil keputusan di tempat. Evaluasi dilakukan setiap beberapa hari untuk melihat apakah penataan perlu diubah. Dengan demikian, praktik manajemen lapak Ramadan benar-benar dijalankan melalui pengawasan

langsung, komunikasi aktif, dan penyesuaian cepat terhadap dinamika di lapangan

Dengan demikian, lapak Ramadan di Masjid At-Tawwabin bukan sekadar kegiatan musiman, tetapi bagian dari strategi manajemen BKM dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Jalan Pimpinan Kota Medan. Kegiatan ini memberikan peningkatan pendapatan bagi pedagang kecil, memperluas jaringan sosial jamaah, serta memperkuat fungsi sosial masjid dalam kehidupan masyarakat. Melalui tata kelola yang terencana, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan, BKM berhasil menjadikan lapak Ramadan sebagai instrumen nyata pemberdayaan ekonomi berbasis masjid.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, manajemen BKM Masjid At-Tawwabin Jalan Pimpinan Kota Medan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat menunjukkan adanya pengelolaan yang terstruktur dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Program lapak Ramadan yang difasilitasi oleh BKM menjadi salah satu strategi konkret dalam mengoptimalkan fungsi sosial dan ekonomi masjid. Pengelolaan yang tertib, penataan lokasi yang rapi, serta keterlibatan langsung masyarakat sekitar membuktikan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat aktivitas ekonomi berbasis komunitas.

Keberadaan lapak Ramadan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi pedagang kecil, terutama dalam meningkatkan pendapatan selama bulan suci. Peningkatan jumlah jamaah yang datang untuk beribadah turut mendorong meningkatnya permintaan makanan dan minuman berbuka puasa. Hal ini menciptakan peluang usaha musiman yang mampu membantu pemenuhan kebutuhan keluarga pedagang. Selain itu, lapak Ramadan juga memperluas jaringan konsumen serta meningkatkan stabilitas usaha mikro di lingkungan sekitar masjid.

Dari sisi sosial, pengelolaan lapak Ramadan turut memperkuat hubungan antara BKM, pedagang, dan jamaah. Aktivitas ekonomi yang terpusat di area masjid menciptakan ruang interaksi yang positif, menumbuhkan rasa kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan masjid. Dengan demikian, manajemen BKM At-Tawwabin dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui lapak Ramadan tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperkuat fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan umat yang berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, F. (2021). Masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 45–56.
- Aslati, Silawati, & Arif, M. (2018). *Pemberdayaan ekonomi berbasis masjid*. UIN Suska Riau Press.
- Centers, E. (2023). The role of mosques as centers for education and social engagement in Islamic. 6(2), 5–10. <https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v6i2.184>
- Cokrohadisumarto, M., & Sari, Y. I. (2024). Mosque-based integrated community empowerment model. 4(1). <https://doi.org/10.58968/isf.v4i1.372>
- Haris, A., & Mustomi, O. (2025). The economic vibrancy of Muslims during Ramadan. 5(2), 22–26. <https://doi.org/10.51773/ajcd.v5i2.390>
- Huda, N., & Rasyid, A. (2022). Peran masjid dalam penguatan ekonomi berbasis komunitas. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 18(2), 90–101.
- Ibrahim, M. (2020). Manajemen masjid modern dalam pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Manajemen Islam*, 7(1), 33–44.
- Islam, U., Sumatera, N., & Utara, S. (2025). Mosque-based community empowerment in improving the economy of the Muhammadiyah Taqwa Mosque Dolok Masihul, Serdang Bedagai Regency. 6(1), 217–228. <https://doi.org/10.37680/amalee.v6i1.6237>
- Jamaluddin Arsyad, M., Nurhadi, & Syarifuddin. (2021). Peran masjid dalam pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 9(2), 123–135.
- Kalimah, S., & Tamrin, M. A. (n.d.). Management of Ramadan bazaar in empowering the community's economy on the waqf land of the Baitul Khoir Grand Mosque in Tulungagung. 678–690.
- Kasus, S., & Kota, M. A. (2025). *Journal of Islamic Studies*. 2(5), 538–551. <https://doi.org/10.61341/jis/v2i5.109>

- Kudus, R., Ulum, F., Maria, E., & Jamal, M. (2024). Optimalisasi fungsi masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan. *I(3)*, 187–194. <https://doi.org/10.53088/tintamas.v1i3.1295>
- Kurniawan, D. (2023). Optimalisasi fungsi sosial masjid di era digital. *Jurnal Sosial Keagamaan*, *10(3)*, 150–162.
- Latif, S., & Yusuf, R. (2021). Pemberdayaan UMKM berbasis masjid. *Jurnal Ekonomi Syariah*, *9(2)*, 77–88. <https://doi.org/10.54576/annahl.v9i2.58>
- Mansur, A. (2022). Masjid dan pengembangan ekonomi umat di Indonesia. *Jurnal Studi Islam*, *14(1)*, 55–67.
- Mulyandi, M. R., S, V. L., & Yumeina, T. (2024). Economic empowerment of mosques as provider for community economic services. *9(1)*, 140–154. <https://doi.org/10.30631/jjoieb.v9i1.2300>
- Pgri, U. I. (2014). *Pusat ekonomi dan dakwah multikultural Walisongo*. *22*, 321–350. <https://doi.org/10.21580/ws.22.2.269>
- Rahman, F. (2023). Transformasi fungsi masjid dalam pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Sosial dan Dakwah*, *11(2)*, 101–113.
- Rifa, A. (1999). 155–163. <https://doi.org/10.2307/4011110>
- Role, T. H. E., Cultural, O. F., In, C., Ramadhan, T. H. E., Bazar, F., Prosperate, T. O., Great, T. H. E., In, M., & City, M. (2023). The role of cultural communication in the Ramadan bazaar.
- Semin, A., Hilalludin, S. H., & others. (2025). Optimalisasi fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan sosial masyarakat melalui program pengabdian di masjid berpotensi besar sebagai pusat pendidikan informal yang mampu menjangkau. *1(1)*, 50–63.
- Sulaiman, H. (2020). Ekonomi Islam berbasis komunitas masjid. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, *6(1)*, 20–31.
- Syuhada, W., Mamun, S., Midisen, K., & Ahmad, A. N. (2024). Optimalisasi bazar masjid sebagai katalisator pemberdayaan UMKM: Studi kasus di Perumahan Sukaraya Indah Bekasi. *9(2)*, 447–460. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1912>
- Terry, G. R. (2014). *Dasar-dasar manajemen*. Bumi Aksara.
- Tinggi, S., & Ekonomi, I. (2025). Tersedia: <https://journal.areai.or.id/index.php/MENGABDI>. 107–120.
- Yasin, M. (2024). Peran masjid dalam penguatan ekonomi lokal. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, *8(1)*, 66–78. <https://doi.org/10.59966/semar.v1i04.510>